

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai dinamika Partai Masyumi di Jawa Barat periode tahun 1950-1960. Maka penulis dapat menyimpulkan. *Pertama*, banyaknya pendukung Partai Masyumi di Jawa Barat tahun 1950-1960 karena masyarakat Jawa Barat mayoritas beragama Islam, bahkan dapat dikatakan agama Islamnya kuat. Maka dengan begitu, respon terhadap Partai Masyumi sebagai partai Islam mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat Jawa Barat. Adanya Keterlibatan para tokoh agama seperti ulama dan kiai dalam memperjuangkan Partai Masyumi menjadi pendorong masyarakat untuk mendukung Partai Masyumi. Selain itu, ada sebagian masyarakat Jawa Barat menyakini bahwa Partai Masyumi merupakan partai yang akan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan.

Ketika NU keluar dari Partai Masyumi tahun 1952, Masyarakat Jawa Barat mayoritas masih tetap mendukung Partai Masyumi. Ulama dan kiai tradisional di Jawa Barat orintasi politiknya cenderung lebih mendukung Partai Masyumi yang cenderung modern dibandingkan dengan NU yang cenderung tradisional. Banyaknya pendukung Partai Masyumi di Jawa Barat setelah NU keluar juga dikarenakan beberapa organisasi Islam beraliran modern yang dengan

Partai Masyumi berdiri dan berkembang di Jawa Barat seperti Organisasi Persatuan Islam (Persis) dan Organisasi Persatuan Umat Islam (PUI).

Kedua, Perkembangan Partai Masyumi di Jawa Barat tahun 1950-1960.

Awal tahun 1950'an kebanyakan masyarakat Jawa Barat mulai mengetahui Masyumi sebagai Partai politik. Keberadaan Partai Masyumi sebagai partai Islam mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat Jawa Barat dan menjadikan Partai Masyumi menjadi partai yang kuat dan mendominasi perpolitikan Jawa Barat. Dukungan Partai Masyumi semakin bertambah banyak ketika para pemimpin partai sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.

Melihat perkembangan pendukung Partai Masyumi, lawan politik Partai Masyumi mulai melakukan ancaman-ancaman dan isu-isu politik yang menjadikan citra Partai Masyumi menjadi buruk dimata masyarakat. Seperti halnya mengidentikan Partai Masyumi dengan gerakan DI-TII. Hal ini menjadikan sebagian orang-orang yang menjadi anipati atau tidak suka dengan Partai Masyumi. Ancaman dan isu ini semakin berkembang menjelang pemilu 1955. Untuk mengatasi hal tersebut Partai Masyumi pemahaman-pemahaman kepada masyarakat dan giat melaksanakan kampanye. Sehingga dalam pemilu 1955 Partai Masyumi di Jawa Barat mendapatkan suara paling banyak.

Setelah pelaksanaan pemilu 1955, Partai Masyumi sudah mulai memperlihatkan adanya penurunan. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya banyak dilakukan oleh Partai Masyumi dalam sebelum pemilu sudah

jarang dilakukan lagi. Sehingga antusias masyarakat mulai berkurang. Namun hal ini tidak sepenuhnya, Partai Masyumi juga masih melakukan kegiatan seperti pengajian-pengajian bahkan mendirikan lembaga pendidikan seperti mendirikan sekolah agama.

Menjelang tahun 1959 sorotan pemerintah terhadap Partai Masyumi mulai tajam. Munculnya gerakan PRRI yang melibatkan para pemimpin-pemimpin Partai Masyumi seperti Mohammad Natsir, Burhanudin Harahap dan Sjafrudin Prawiranegara mengakibatkan munculnya citra yang buruk terhadap Partai Masyumi. Hal ini juga ditambah dengan isu adanya hubungan Partai Masyumi dengan gerakan DI-TII di Jawa Barat. Kondisi Partai Masyumi semakin buruk ketika Partai Masyumi mengambil sikap tidak mendukung pemerintahan presiden Soekarno dengan alasan masuknya PKI dalam politik pemerintahann presiden Soekarno. Selain itu, Partai Masyumi menganggap bahwa sistem Demokrasi Terpimpin dinilai sebagai *move* Presiden Soekarno untuk menciptakan suatu negara kekuasaan, sebagai lawan dari negara hukum di Indonesia.

Sikap politik Partai Masyumi tersebut berdampak terhadap kegiatan politik Partai Masyumi. Pemerintah Presiden Soekarno tidak memberikan peluang bagi Partai Masyumi untuk berperan dalam pemerintahan. Pada tanggal 15 Agustus 1960, akhirnya Pesiden Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 200/1960, yang bertujuan untuk membubarkan Partai Masyumi tetapi dengan taktik Partai Masyumi yang harus membubarkan sendiri. Pada tanggal 13 September 1960, Partai Masyumi resmi membubarkan diri.

Ketiga, *Kondisi politik Partai Masyumi di Jawa Barat setelah dibubarkan tahun 1960*. Bubarnya Partai Masyumi karena taktik politik pemerintah Soekarno memperlihatkan bahwa hilangnya peranan politik Partai Masyumi ini bukan karena peranan dan pendukung Partai Masyumi yang menurun tetapi karena eksistensi Partai Masyumi diakhiri oleh Presiden Soekarno. Setelah Partai Masyumi resmi membubarkan diri, para mantan pendukung dan pemimpin Partai Masyumi merasa kebingungan tidak ada pegangang. Sehingga untuk menyalurkan aspirasi organisasinya mereka masuk kedalam organisasi-organisasi Islam lain seperti NU, HMI dan bahkan di Jawa Barat ada organisasi BMAU (Badan Majelis Alim Ulama) wadah bagi para kiai dan ulama yang berada di bawah militer.

Organisasi BMAU ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Islam di Jawa Barat melalui ulama dan kiai yang anti terhadap PKI untuk mencegah kekuatan politik PKI. Salah satu cara untuk mencegah kekuatan politik PKI yaitu dengan mencegah masuknya paham komunis terhadap masyarakat di Jawa Barat. Maka dari itu, usaha Nasakomisasi di Jawa Barat tidak selancar seperti yang diharapkan oleh PKI, karena masyarakat Jawa Barat yang umumnya beragama Islam dan dulunya merupakan basis pendukung partai Masyumi sukar untuk menerima ideolog Komunis.

Kegiatan-kegiatan mantan para pendukung Partai Masyumi di Jawa Barat dalam perkembangannya memperlihatkan bahwa mereka mendukung pemerintah Soekarno. Mereka beranggapan bahwa Perjuangan Islam pada masa ini tidak lagi

mendirikan negara Islam seperti halnya perjuangan Partai Masyumi karena mustahil bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam ditengah kondisi politik Indonsia yang sudah eksis dngan negara Pancasila. Maka dengan begitu, untuk kalangan masyarakat Jawa barat yang luas, mantan pendukung partai Masyumi sebelumnya lebih memilih untuk tidak berorintasi dalam bidang politik, mereka lebih memilih untuk memajukan agama Islam dan untuk bidang politik mereka mengikuti kebijakan pemerintah.

5.2. Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi pada pembelajaran sejarah di sekolah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Materi dari penelitian ini sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) kelas XII program IPS semester I yaitu dengan SK menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru dan KD menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan. Selain itu SKKD kelas XI program IPA semester II dan kelas XII program Bahasa semester I dengan SK merekontruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru dan KD merekontruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak Proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin.

Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perkuliahan khususnya mata kuliah Sejarah Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, yang berminat melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sejarah partai politik Islam di Indonesia, terutama dengan ruang lingkup lokalitas di Jawa Barat. Penulis menyarankan beberapa permasalahan yang belum diteliti seperti peranan para kiai dan ulama di Jawa Barat dalam politik Partai Masyumi, atau hubungan Partai Masyumi dan gerakan DI-TII di Jawa Barat.